

Rekonstruksi Kerangka 5A untuk Destinasi Wisata Perkotaan di Indonesia, Menempatkan Keterlibatan Komunitas sebagai Komponen Inti

Reconstructing the 5A Framework for Indonesian Urban Tourism Destinations

Muhammad Rahmad¹, Elyn Hastriana²

¹Institut Pariwisata Trisakti; ²Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id; ehastriana@gmail.com

ABSTRAK

Kerangka 5A yang mencakup atraksi, amenitas, aksesibilitas, ansilari, dan keterlibatan komunitas telah menjadi alat baku dalam perencanaan destinasi wisata perkotaan di Indonesia. Kerangka ini dipakai dalam penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, dalam penilaian kesiapan destinasi, dan dalam banyak penelitian akademis. Persoalannya, kelima komponen itu hampir selalu diperlakukan sebagai daftar yang sejajar dan dapat dijumlahkan. Konsekuensinya, keterlibatan komunitas kerap ditempatkan pada urutan terakhir, dinilai dengan indikator yang paling lemah, dan diperlakukan sebagai pelengkap dari empat komponen fisik yang mendahuluinya. Artikel konseptual ini mengajukan rekonstruksi terhadap cara kerangka tersebut dibaca. Melalui telaah pustaka integratif atas literatur pariwisata perkotaan mutakhir dan pembacaan ulang terhadap sejumlah kasus destinasi perkotaan di Indonesia, artikel ini berargumen bahwa keterlibatan komunitas bukanlah komponen kelima yang sejajar, melainkan komponen konstitutif yang menentukan apakah empat komponen lainnya bekerja atau tidak. Rekonstruksi ini dituangkan dalam Model 5A Konsentris, yang menempatkan komunitas sebagai inti dan empat komponen lain sebagai lapisan operasional yang mengelilinginya. Artikel mengidentifikasi empat mekanisme yang menjelaskan hubungan konstitutif tersebut, yaitu kepemilikan makna, kapasitas pemeliharaan, legitimasi sosial, dan distribusi manfaat. Empat mekanisme ini kemudian diturunkan menjadi seperangkat indikator yang dapat dipakai dalam penilaian kesiapan destinasi. Artikel juga menegaskan batas keberlakuan model, karena tidak semua tipe destinasi perkotaan memiliki komunitas pemangku yang jelas. Kontribusi artikel bersifat konseptual dan metodologis sekaligus, karena selain menawarkan penataan ulang kerangka, artikel ini juga mengusulkan cara mengukur komponen komunitas secara lebih tegas daripada praktik yang berlaku selama ini.

Kata kunci: pariwisata perkotaan, kerangka 5A, keterlibatan komunitas, kampung kota, perencanaan destinasi

ABSTRACT

The 5A framework covering attractions, amenities, accessibility, ancillary services, and community involvement has become a standard instrument in Indonesian urban tourism destination planning. It informs regional tourism master plans, destination readiness assessments, and a substantial body of academic work. The difficulty is that the five components are almost invariably treated as a parallel and additive list. As a result, community involvement is routinely placed last, measured with the weakest indicators, and treated as a supplement to the four physical components that precede it. This conceptual article proposes a reconstruction of how the framework should be read. Drawing on an integrative review of

recent urban tourism literature and a re-reading of several Indonesian urban destination cases, the article argues that community involvement is not a fifth parallel component but a constitutive component that determines whether the other four function at all. The reconstruction is expressed as a Concentric 5A Model, placing community at the core and the remaining four components as an operational layer surrounding it. The article identifies four mechanisms that explain this constitutive relation, namely ownership of meaning, maintenance capacity, social legitimacy, and benefit distribution. These mechanisms are then translated into a set of indicators usable in destination readiness assessment. The article also states the boundary conditions of the model, since not every type of urban destination has an identifiable host community. The contribution is both conceptual and methodological, offering not only a rearrangement of the framework but also a firmer way of measuring its community component than current practice allows.

Keywords: *urban tourism, 5A framework, community involvement, urban kampung, destination planning*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata perkotaan telah lama menempati posisi yang paradoks dalam kajian kepariwisataan. Kota adalah destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di dunia, tetapi kajian akademis tentangnya justru berkembang lebih lambat dibanding kajian tentang destinasi alam atau destinasi pesisir. Page dan Duignan (2023) menyebut pariwisata perkotaan sebagai domain riset yang paradoks, karena bidang ini kaya secara empiris namun tetap tipis secara teoritis. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan bidang ini meminjam kerangka analitis dari kajian destinasi secara umum tanpa menguji ulang apakah kerangka tersebut benar-benar cocok untuk konteks perkotaan.

Salah satu kerangka pinjaman yang paling luas dipakai adalah kerangka komponen destinasi. Kerangka ini bermula dari perumusan empat komponen destinasi, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ansilari, yang kemudian populer disebut kerangka 4A. Perumusan awalnya dapat ditelusuri pada literatur pengantar kepariwisataan, di antaranya Dickman (1996) dan Cooper dkk. (2008), serta dipertegas oleh Buhalis (2000) yang menyusun komponen destinasi menjadi enam unsur untuk kepentingan pemasaran destinasi. Dalam literatur Indonesia, kerangka empat komponen ini diperkenalkan secara luas oleh Sunaryo (2013) dan sejak itu menjadi rujukan hampir seluruh dokumen perencanaan kepariwisataan daerah.

Dalam perkembangannya, kerangka 4A diperlebar menjadi 5A dengan menambahkan keterlibatan komunitas sebagai komponen kelima. Penambahan ini merupakan respons yang wajar terhadap kritik bahwa kerangka empat komponen terlalu berorientasi pada penawaran dan mengabaikan warga yang tinggal di dalam destinasi. Buku ajar Pariwisata Perkotaan yang disusun Rahmad dkk. (2025) mencatat kelima komponen ini sebagai komponen inti pariwisata perkotaan dan menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan bergantung pada integrasi kelimanya. Penegasan semacam ini kini menjadi rumusan standar dalam banyak literatur ajar dan dokumen kebijakan di Indonesia.

Persoalan muncul bukan pada penambahan komponennya, melainkan pada cara komponen itu diperlakukan. Ketika keterlibatan komunitas dimasukkan sebagai komponen kelima dalam sebuah daftar, secara implisit ia diperlakukan setara dan sejajar dengan empat komponen

sebelumnya. Cara baca seperti ini membawa tiga konsekuensi yang problematik. Pertama, komponen komunitas menjadi dapat dipertukarkan dengan komponen lain, seolah kelemahan pada keterlibatan komunitas dapat dikompensasi dengan keunggulan pada aksesibilitas atau amenitas. Kedua, karena berada di urutan terakhir, komponen ini paling sering menjadi korban keterbatasan anggaran dan waktu dalam penyusunan rencana. Ketiga, indikator yang dipakai untuk mengukurnya cenderung paling lemah, sering kali sekedar berupa jumlah kegiatan sosialisasi atau jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk, tanpa menyentuh soal siapa yang sesungguhnya mengendalikan keputusan dan siapa yang menerima manfaat.

Pengamatan terhadap sejumlah destinasi perkotaan di Indonesia menunjukkan gejala yang berlawanan dengan asumsi kesejajaran itu. Kampung Warna Jodipan di Malang berubah dari permukiman padat menjadi destinasi yang dikenal luas bukan karena atraksinya secara fisik istimewa, melainkan karena warga menjadi penggerak dan pemilik proses transformasinya (Sulistyaningsih dkk., 2022). Kampoeng Batik di Semarang bertahan sebagai kawasan wisata karena ada komunitas perajin yang mempertahankan praktik produksi yang menjadi isi dari atraksi itu sendiri (Kurniati dkk., 2023). Di sisi sebaliknya, sejumlah kawasan wisata perkotaan yang dibangun dengan investasi besar pada penataan fisik justru meredup setelah beberapa tahun, karena tidak ada pihak yang merasa memiliki kewajiban memelihara ruang tersebut ketika program pemerintah berakhir.

Pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas tampaknya tidak berperilaku seperti komponen yang sejajar. Ia lebih menyerupai prasyarat yang menentukan apakah komponen lain dapat berfungsi atau tidak. Sebuah atraksi tanpa komunitas pendukung dapat tetap berdiri secara fisik, tetapi ia kehilangan isi dan kehilangan pemeliharanya. Sebaliknya, komunitas yang kuat dapat menciptakan atraksi dari bahan yang sangat sederhana, sebagaimana terlihat pada kasus kampung tematik di berbagai kota Indonesia.

Dari pengamatan tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan konseptual berikut. Apakah keterlibatan komunitas tepat diposisikan sebagai komponen kelima yang sejajar dalam kerangka 5A. Apabila tidak, bagaimana posisi yang lebih tepat secara teoritis. Dan melalui mekanisme apa keterlibatan komunitas memengaruhi keberfungsian empat komponen lainnya.

Tujuan artikel ini ada tiga. Pertama, menguji secara kritis asumsi kesejajaran yang melekat pada kerangka 5A dalam praktik perencanaan destinasi perkotaan di Indonesia. Kedua, mengajukan rekonstruksi kerangka tersebut dalam bentuk model yang menempatkan komunitas sebagai komponen konstitutif, bukan komponen aditif. Ketiga, menurunkan rekonstruksi itu menjadi seperangkat indikator yang dapat dipakai dalam penilaian kesiapan destinasi, sehingga usulan konseptual ini tidak berhenti sebagai gagasan abstrak.

Artikel ini diharapkan memberi kontribusi pada dua ranah. Pada ranah teoritis, artikel menawarkan penataan ulang salah satu kerangka yang paling banyak dipakai namun paling jarang diuji ulang dalam kajian pariwisata Indonesia. Pada ranah praktis, artikel menyediakan cara yang lebih tegas untuk menilai komponen komunitas dalam dokumen perencanaan, sehingga komponen ini tidak lagi menjadi bagian yang paling mudah diabaikan.

2. METODE

Artikel ini merupakan artikel konseptual, bukan artikel penelitian empiris. Artinya, kontribusi yang ditawarkan berupa penataan ulang hubungan antarkonsep, bukan temuan data baru. Jaakkola (2020) mengidentifikasi empat pendekatan dalam penulisan artikel konseptual, yaitu teori adaptasi, sintesis teori, tipologi, dan model. Artikel ini menggunakan pendekatan teori adaptasi, karena yang dilakukan adalah mengambil kerangka yang sudah mapan lalu mengubah cara hubungan antarkomponennya dibaca, dengan meminjam lensa dari literatur partisipasi dan tata kelola sumber daya bersama.

Bahan analisis dikumpulkan melalui telaah pustaka integratif sebagaimana dirumuskan Torraco (2005) dan Snyder (2019). Telaah integratif dipilih karena tujuannya bukan memetakan seluruh literatur secara menyeluruh, melainkan mengkritisi dan mensintesis literatur pada sebuah topik yang sudah mapan agar menghasilkan kerangka baru. Pustaka yang ditelaah dikelompokkan menjadi tiga rumpun. Rumpun pertama adalah literatur tentang komponen dan kerangka destinasi, yang menjadi objek kritik. Rumpun kedua adalah literatur pariwisata perkotaan mutakhir, terutama yang membahas ketegangan antara pariwisata dan warga kota. Rumpun ketiga adalah literatur partisipasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya bersama, yang dipakai sebagai lensa untuk membaca ulang posisi komunitas.

Selain telaah pustaka, artikel ini menggunakan sejumlah kasus destinasi perkotaan di Indonesia sebagai ilustrasi analitis. Perlu ditegaskan bahwa kasus-kasus tersebut tidak diperlakukan sebagai data primer dan tidak dimaksudkan untuk menguji model secara empiris. Kasus dipakai dalam fungsi yang lazim dalam artikel konseptual, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan bahwa persoalan yang dibahas nyata dan untuk memperjelas cara kerja model yang diusulkan. Kasus yang dipakai dipilih karena telah terdokumentasi dalam literatur akademis yang dapat ditelusuri, sehingga pembacaannya dapat diverifikasi oleh pembaca lain.

Prosedur analisis ditempuh dalam empat langkah. Langkah pertama adalah menelusuri asal usul dan perkembangan kerangka komponen destinasi untuk memahami logika yang mendasarinya. Langkah kedua adalah mengidentifikasi konsekuensi analitis dari logika tersebut ketika komponen komunitas ditambahkan ke dalamnya. Langkah ketiga adalah membaca ulang literatur pariwisata perkotaan dan kasus Indonesia untuk menguji apakah konsekuensi tersebut terlihat dalam praktik. Langkah keempat adalah merumuskan model alternatif beserta mekanisme dan indikatornya, lalu menetapkan batas keberlakuan model tersebut secara eksplisit.

3. LANDASAN KONSEPTUAL

3.1 Asal Usul Kerangka Komponen Destinasi dan Logika Aditifnya

Kerangka komponen destinasi lahir dari kebutuhan praktis untuk menginventarisasi apa saja yang harus tersedia agar sebuah tempat dapat berfungsi sebagai destinasi wisata. Dalam perumusan awalnya, kerangka ini menempatkan atraksi sebagai alasan orang datang, amenitas sebagai penunjang kenyamanan selama berada di destinasi, aksesibilitas sebagai penghubung yang memungkinkan orang sampai, dan ansilari sebagai layanan pendukung yang melengkapi pengalaman (Dickman, 1996; Cooper dkk., 2008). Buhalis (2000) memperluas rumusan ini dengan menambahkan paket wisata dan kegiatan sebagai unsur tersendiri, terutama untuk kepentingan analisis daya saing destinasi.

Kerangka komponen ini perlu dibedakan dari dua kerangka besar lain yang juga lazim dipakai dalam kajian destinasi. Teori sistem pariwisata yang dirumuskan Leiper (1979) menjelaskan pariwisata sebagai sistem terbuka yang menghubungkan daerah asal, daerah transit, dan daerah tujuan. Teori siklus hidup destinasi yang diajukan Butler (1980) menjelaskan perubahan destinasi dari waktu ke waktu melalui serangkaian tahap. Keduanya bersifat menjelaskan proses. Kerangka komponen destinasi bersifat lain, karena ia menjelaskan susunan, bukan proses. Perbedaan watak inilah yang membuat kerangka komponen mudah diterjemahkan menjadi daftar periksa dan sekaligus mudah kehilangan dimensi waktu.

Perlu dicatat pula bahwa kerangka ini lahir dari tradisi manajemen dan pemasaran, bukan dari tradisi perencanaan kota atau sosiologi perkotaan. Logika yang mendasarinya adalah logika inventarisasi penawaran. Sebuah destinasi dianggap siap apabila keempat komponen tersebut tersedia dalam mutu yang memadai. Dari logika ini lahir praktik penilaian yang bersifat aditif, di mana masing-masing komponen dinilai secara terpisah lalu hasilnya dijumlahkan atau dirata-ratakan menjadi skor kesiapan destinasi.

Logika aditif memiliki keunggulan yang nyata. Ia sederhana, mudah dikomunikasikan kepada pengambil keputusan, dan memudahkan pembagian tugas antarinstansi. Dinas perhubungan menangani aksesibilitas, dinas pekerjaan umum menangani sebagian amenitas, dinas pariwisata menangani atraksi dan promosi. Kemudahan inilah yang menjelaskan mengapa kerangka ini bertahan begitu lama dalam praktik perencanaan.

Namun logika aditif juga membawa asumsi yang jarang disadari, yaitu asumsi bahwa komponen bersifat saling menggantikan sampai batas tertentu. Dalam penilaian berbasis skor, destinasi dengan aksesibilitas sangat baik dan keterlibatan komunitas sangat rendah dapat memperoleh skor total yang sama dengan destinasi yang keadaannya terbalik. Asumsi ini tidak pernah dinyatakan secara terbuka, tetapi ia melekat pada setiap instrumen penilaian yang menjumlahkan komponen.

3.2 Masuknya Komunitas sebagai Komponen Kelima

Penambahan komunitas sebagai komponen kelima merupakan koreksi terhadap watak kerangka awal yang terlalu berorientasi pada penawaran. Koreksi ini sejalan dengan arus panjang dalam kajian kepariwisataan yang menegaskan bahwa pariwisata terjadi di ruang hidup orang lain. Murphy (1985) sudah menegaskan sejak awal bahwa pariwisata pada dasarnya adalah kegiatan berbasis komunitas, karena yang dijual sebagian besar adalah keramahan, budaya, dan lingkungan yang dimiliki warga setempat.

Dalam literatur pariwisata perkotaan mutakhir, penegasan itu justru semakin relevan. Novy dan Colomb (2021) menunjukkan bahwa pariwisata perkotaan telah menjadi sumber kontestasi dan mobilisasi sosial di banyak kota, ketika warga merasa ruang hidupnya diambil alih oleh kepentingan wisata. López-Gay dkk. (2021) memperlihatkan bagaimana pariwisata memicu perubahan komposisi penduduk dan gentrifikasi di kawasan yang menjadi tujuan wisata. Nilsson (2020) merumuskan overtourism bukan sekedar sebagai persoalan jumlah pengunjung, melainkan sebagai persoalan hubungan antara kecepatan pertumbuhan pariwisata dan kemampuan warga menyerap perubahan.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa warga kota bukan penonton dalam pariwisata perkotaan. Mereka adalah pihak yang menanggung akibatnya secara langsung dan sekaligus pihak yang menentukan apakah pariwisata dapat berlanjut. Phuc dan Nguyen (2023) memperlihatkan bahwa dukungan penduduk terhadap pariwisata perkotaan berkelanjutan bertumpu pada kolaborasi dan solidaritas emosional, bukan pada kompensasi ekonomi semata. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan warga dengan pariwisata bersifat relasional, bukan transaksional.

Persoalannya, ketika kesadaran ini dituangkan ke dalam kerangka 5A, bentuk penuangannya tetap mengikuti logika lama. Komunitas dimasukkan sebagai satu kotak tambahan di samping empat kotak yang sudah ada. Kesadaran teoritisnya maju, tetapi arsitektur kerangkanya tidak berubah. Inilah celah yang hendak diisi artikel ini.

3.3 Lensa Partisipasi dan Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Untuk membaca ulang posisi komunitas, artikel ini meminjam tiga lensa dari luar kerangka komponen destinasi.

Lensa pertama adalah tangga partisipasi yang dirumuskan Arnstein (1969). Arnstein menegaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan yang berbeda secara mendasar, mulai dari manipulasi dan terapi pada tingkat terendah, konsultasi dan penenteraman pada tingkat menengah, hingga kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kendali warga pada tingkat tertinggi. Yang membedakan tingkat-tingkat itu bukan intensitas kegiatan, melainkan sejauh mana warga memiliki kuasa atas keputusan. Lensa ini penting karena dalam praktik perencanaan pariwisata di Indonesia, kegiatan yang disebut partisipasi sering berhenti pada tingkat konsultasi. Tosun (2000) memperkuat pengamatan ini dengan menunjukkan bahwa di negara berkembang partisipasi dalam pariwisata umumnya bersifat induced dan pasif, karena terbatas oleh struktur kekuasaan dan kapasitas kelembagaan.

Lensa kedua adalah teori kolaborasi dalam perencanaan pariwisata. Jamal dan Getz (1995) merumuskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan bukan sekedar soal mengumpulkan pihak dalam satu forum, melainkan soal membangun aturan main bersama tentang bagaimana keputusan diambil. Mitchell dkk. (1997) menambahkan bahwa pemangku kepentingan tidak setara, karena mereka berbeda dalam kekuasaan, legitimasi, dan urgensi tuntutan. Dalam pariwisata perkotaan, warga kampung wisata umumnya memiliki legitimasi tinggi tetapi kekuasaan rendah. Ketidakseimbangan ini tidak terbaca sama sekali dalam kerangka 5A yang aditif.

Lensa ketiga adalah teori pengelolaan sumber daya bersama yang dirumuskan Ostrom (1990). Ostrom menunjukkan bahwa sumber daya milik bersama dapat dikelola secara lestari tanpa privatisasi maupun tanpa kendali negara sepenuhnya, sepanjang terpenuhi sejumlah prinsip kelembagaan, di antaranya batas yang jelas, aturan yang sesuai kondisi setempat, mekanisme pemantauan, sanksi bertingkat, dan pengakuan atas hak warga untuk mengatur diri. Lensa ini sangat relevan untuk pariwisata perkotaan, karena banyak sekali komponen destinasi perkotaan sesungguhnya berwatak sumber daya bersama. Gang kampung, ruang publik, kebersihan lingkungan, keramahan warga, dan suasana kawasan tidak dimiliki oleh satu pihak, tetapi mutunya menentukan pengalaman wisata secara langsung.

Ketiga lensa ini mengarah pada satu simpulan yang sama. Komunitas bukan sekedar salah satu penyedia unsur destinasi. Komunitas adalah pihak yang memegang kendali atas mutu sumber daya bersama yang menjadi bahan baku dari hampir seluruh komponen lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tiga Kelemahan Kerangka 5A yang Aditif

Berdasarkan telaah di atas, artikel ini mengidentifikasi tiga kelemahan mendasar dalam pembacaan aditif terhadap kerangka 5A.

Kelemahan pertama adalah kekeliruan tingkatan analisis. Empat komponen pertama berada pada tingkat penawaran, yaitu berupa sarana, prasarana, dan layanan yang dapat diadakan melalui pengadaan barang dan jasa. Keterlibatan komunitas berada pada tingkat yang berbeda, yaitu tingkat hubungan sosial dan kelembagaan. Atraksi dapat dibangun dalam satu tahun anggaran. Kepercayaan warga tidak dapat dibangun dengan cara yang sama. Menempatkan dua hal yang berbeda tingkatan ini dalam satu daftar yang sejajar menyebabkan kekeliruan kategori. Akibat praktisnya terlihat jelas, yaitu ketika komponen komunitas diterjemahkan menjadi kegiatan pelatihan dan pembentukan kelompok, karena hanya bentuk itulah yang dapat masuk ke dalam logika pengadaan.

Kelemahan kedua adalah asumsi kemampuan saling menggantikan. Dalam penilaian berbasis skor, kelemahan pada satu komponen dapat tertutup oleh keunggulan pada komponen lain. Asumsi ini masuk akal untuk sebagian komponen. Kelemahan pada angkutan umum memang dapat sebagian tertutup oleh ketersediaan angkutan daring. Tetapi asumsi ini tidak berlaku untuk komunitas. Kawasan wisata yang warganya menolak kehadiran wisatawan tidak dapat diselamatkan oleh amenities kelas satu. Yang terjadi justru sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan Novy dan Colomb (2021), di mana penambahan fasilitas wisata di kawasan yang warganya sudah resisten malah memperbesar ketegangan.

Kelemahan ketiga adalah kelemahan indikator. Karena diperlakukan sebagai komponen sejajar, keterlibatan komunitas dinilai dengan logika ketersediaan, sama seperti komponen fisik. Pertanyaan yang diajukan berbentuk apakah sudah ada kelompok sadar wisata, berapa kali pelatihan diadakan, dan berapa orang yang hadir dalam musyawarah. Semua itu adalah ukuran kegiatan, bukan ukuran kuasa maupun ukuran manfaat. Menggunakan tangga Arnstein (1969), indikator semacam ini tidak mampu membedakan antara warga yang benar-benar memutuskan dan warga yang sekedar diberi tahu.

Ketiga kelemahan itu bermuara pada satu akibat yang sama, yaitu komponen yang paling menentukan keberlanjutan justru menjadi komponen yang paling lemah pengukurannya dan paling mudah dikorbankan.

4.2 Proposisi Rekonstruksi, Model 5A Konsentris

Artikel ini mengusulkan agar kerangka 5A dibaca ulang bukan sebagai daftar sejajar, melainkan sebagai susunan berlapis. Usulan ini disebut Model 5A Konsentris.

Dalam model ini, keterlibatan komunitas ditempatkan sebagai inti. Empat komponen lainnya, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ansilari, ditempatkan sebagai lapisan operasional yang mengelilingi inti tersebut. Lapisan operasional adalah wujud yang terlihat dan dialami wisatawan. Inti adalah yang menentukan apakah wujud itu memiliki isi, terpelihara, diterima, dan bertahan.

Pernyataan inti dari model ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterlibatan komunitas bukan komponen yang ditambahkan pada empat komponen lain, melainkan syarat yang menentukan kadar keberfungsian keempatnya. Dalam bahasa hubungan antarvariabel, komunitas tidak berperan sebagai variabel aditif, melainkan sebagai variabel pengganda dan sekaligus penyangga.

Perumusan ini membawa satu konsekuensi analitis yang tegas. Dalam model aditif, skor destinasi adalah jumlah dari kelima komponen. Dalam model konsentris, mutu destinasi adalah hasil kali antara mutu lapisan operasional dan kadar keterlibatan komunitas. Perbedaannya terletak pada perlakuan terhadap nilai nol. Dalam penjumlahan, satu komponen yang bernilai nol masih menyisakan nilai dari komponen lain. Dalam perkalian, satu komponen yang bernilai nol meniadakan seluruhnya. Justru sifat inilah yang tampak dalam kenyataan. Kawasan wisata perkotaan yang kehilangan dukungan warganya tidak menjadi destinasi yang bermutu sedang, melainkan berhenti berfungsi sebagai destinasi.

Dari pernyataan inti tersebut diturunkan empat proposisi.

Proposisi pertama menyatakan bahwa atraksi wisata perkotaan yang bersumber dari kehidupan warga akan kehilangan isinya apabila warga berhenti menjalankan kehidupan tersebut. Kawasan perajin yang perajinnya berhenti memproduksi hanya menyisakan bangunan.

Proposisi kedua menyatakan bahwa mutu amenitas dan ruang publik dalam destinasi perkotaan bergantung pada pemeliharaan harian yang sebagian besar berada di luar jangkauan aparat pemerintah. Kebersihan gang, keamanan lingkungan, dan ketertiban parkir dihasilkan oleh kebiasaan warga, bukan oleh pengawasan.

Proposisi ketiga menyatakan bahwa aksesibilitas dalam kawasan permukiman padat merupakan hasil dari kesepakatan sosial, bukan semata hasil pembangunan prasarana. Warga yang tidak sepakat dapat menutup akses secara efektif tanpa melanggar aturan apa pun.

Proposisi keempat menyatakan bahwa layanan ansilari yang paling menentukan pengalaman wisata perkotaan, yaitu penyampaian informasi, penafsiran makna tempat, dan rasa aman, sebagian besar diproduksi melalui interaksi dengan warga, bukan melalui lembaga formal.

Keempat proposisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara komunitas dan empat komponen lain bukan hubungan penjumlahan, melainkan hubungan yang menentukan mutu.

4.3 Empat Mekanisme Konstitutif

Agar model ini tidak berhenti sebagai pernyataan umum, artikel ini merumuskan empat mekanisme yang menjelaskan bagaimana keterlibatan komunitas bekerja terhadap komponen lain.

Mekanisme pertama adalah kepemilikan makna. Atraksi perkotaan sebagian besar bukan benda, melainkan makna yang melekat pada benda. Sebuah gang menjadi menarik karena ada cerita, praktik, dan identitas yang hidup di dalamnya. Speake dan Kennedy (2022) menunjukkan bahwa perubahan estetika ruang kota mengubah cara ruang itu dimaknai dan dialami. Ketika penataan dilakukan tanpa warga, yang berubah bukan hanya tampilan fisik, tetapi juga hubungan warga dengan tempatnya sendiri. Akibatnya, atraksi kehilangan sumber maknanya dan berubah menjadi latar foto yang cepat usang. Kepemilikan makna berarti warga tetap menjadi penutur cerita tentang tempatnya, bukan sekedar menjadi bagian dari pemandangan.

Mekanisme kedua adalah kapasitas pemeliharaan. Destinasi perkotaan bertumpu pada pemeliharaan harian yang jumlahnya sangat banyak dan nilainya per satuan sangat kecil. Menyapu gang, mengecat ulang dinding, menegur pengunjung yang membuang sampah, dan merawat tanaman adalah pekerjaan yang tidak mungkin sepenuhnya dibiayai anggaran pemerintah. Di sinilah kerangka Ostrom (1990) menemukan relevansinya. Pemeliharaan berkelanjutan hanya terjadi apabila ada aturan yang disepakati warga sendiri, ada pemantauan oleh warga, dan ada sanksi sosial yang bekerja. Kapasitas pemeliharaan inilah yang membedakan kawasan wisata yang bertahan sepuluh tahun dari kawasan yang meredup setelah dua tahun.

Mekanisme ketiga adalah legitimasi sosial. Pariwisata perkotaan berlangsung di ruang hidup warga, sehingga ia selalu memerlukan izin sosial untuk beroperasi. Izin ini tidak tertulis dan tidak diterbitkan lembaga mana pun, tetapi pencabutannya berakibat langsung. Novy dan Colomb (2021) serta López-Gay dkk. (2021) memperlihatkan bagaimana hilangnya legitimasi sosial berujung pada penolakan terbuka terhadap wisatawan di sejumlah kota Eropa. Dalam konteks Indonesia, penarikan legitimasi jarang berbentuk demonstrasi, tetapi lebih sering berbentuk penarikan diri, di mana warga berhenti terlibat, berhenti memelihara, dan membiarkan kawasan berjalan sendiri. Bentuk penolakan yang senyap ini justru lebih sulit dideteksi oleh instrumen penilaian yang ada.

Mekanisme keempat adalah distribusi manfaat. Ketiga mekanisme sebelumnya tidak akan bertahan apabila manfaat ekonomi pariwisata tidak sampai kepada warga yang menanggung biayanya. Zhang (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara pariwisata dan ketimpangan bersifat tidak linear, sehingga pertumbuhan kunjungan tidak dengan sendirinya memperbaiki keadaan warga. Bellato dkk. (2023) menegaskan bahwa pariwisata regeneratif menempatkan komunitas bukan sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pencipta nilai bersama. Perbedaan kedudukan ini menentukan apakah warga akan mempertahankan tiga mekanisme sebelumnya dalam jangka panjang.

Keempat mekanisme tersebut saling terkait dalam satu rangkaian. Kepemilikan makna menghasilkan alasan untuk memelihara. Kapasitas pemeliharaan menjaga mutu ruang. Mutu ruang menjaga legitimasi sosial. Distribusi manfaat menjaga agar seluruh rangkaian itu masuk akal secara ekonomi bagi warga. Apabila salah satu mata rantai putus, rantai berikutnya melemah secara berurutan.

4.4 Pembacaan Ulang atas Kasus Destinasi Perkotaan Indonesia

Model konsentris dapat diuji kegunaannya dengan membaca ulang sejumlah kasus yang sudah terdokumentasi.

Kasus Kampung Warna Jodipan di Malang menunjukkan bekerjanya mekanisme kepemilikan makna dan kapasitas pemeliharaan secara bersamaan. Sulistyaningsih dkk. (2022) mencatat bahwa transformasi kawasan kumuh menjadi kampung wisata di Jodipan berlangsung melalui pendekatan pemasaran sosial berbasis komunitas yang menggabungkan orientasi pemasaran dan perencanaan. Apabila dibaca dengan kerangka 5A aditif, Jodipan akan mendapat nilai rendah pada hampir semua komponen fisik. Atraksinya berupa cat pada dinding rumah, amenitasnya sangat terbatas, dan aksesibilitas di dalam kawasan berupa gang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan. Namun kawasan ini berhasil menarik kunjungan dalam jumlah besar. Model konsentris menjelaskan hasil yang tampak janggal ini, karena kekuatan Jodipan memang tidak terletak pada lapisan operasional, melainkan pada intinya.

Kasus Kampoeng Batik Semarang memperlihatkan mekanisme yang berbeda. Kurniati dkk. (2023) mengidentifikasi model kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan komunitas lokal sebagai faktor kunci keberlanjutan kawasan tersebut. Di sini atraksi tidak berupa tampilan visual, melainkan berupa praktik produksi yang masih berjalan. Praktik ini melekat pada orang, bukan pada bangunan. Konsekuensinya jelas, yaitu apabila regenerasi perajin gagal, atraksinya hilang, betapapun bagus penataan fisik kawasan. Kasus ini menegaskan proposisi pertama secara langsung.

Dua kasus tersebut sering dibaca sebagai kisah sukses partisipasi. Pembacaan yang lebih berhati-hati diperlukan di sini. Keberhasilan awal kampung tematik di Indonesia relatif mudah dicapai karena bertumpu pada kebaruan. Ujian sesungguhnya berlangsung pada tahun ketiga sampai kelima, ketika kebaruan memudar dan pemeliharaan menjadi beban rutin. Pada titik itulah mekanisme distribusi manfaat menjadi penentu. Apabila manfaat terkonsentrasi pada sedikit warga yang rumahnya berada di titik foto utama, sementara warga lain hanya menanggung gangguan, maka legitimasi sosial akan tergerus dari dalam tanpa terlihat dari luar.

Pembacaan terhadap kawasan wisata perkotaan berskala besar memberikan gambaran yang berbeda lagi. Kawasan kota lama di beberapa kota besar Indonesia telah menerima investasi penataan fisik yang besar, meliputi pedestrianisasi, penataan fasad, penerangan, dan penataan pedagang. Dalam kerangka aditif, kawasan semacam ini memperoleh nilai tinggi. Namun sebagian di antaranya tetap mengalami kesulitan mempertahankan denyut kegiatan setelah tahap penataan selesai. Model konsentris membaca gejala ini sebagai persoalan inti yang kosong, di mana penataan dilakukan untuk kawasan yang komunitas penghuninya sudah berpindah atau tergantikan. Ketika penghuni asli tergeser, tidak tersisa pihak yang memikul kewajiban pemeliharaan harian dan tidak tersisa penutur makna tempat. Bacaan ini sejalan dengan temuan López-Gay dkk. (2021) tentang hubungan antara pariwisata, perubahan penduduk, dan gentrifikasi.

Pembacaan terakhir perlu diarahkan pada kawasan yang menghadapi tekanan kunjungan berlebih. Kawasan wisata perkotaan yang sangat populer di Yogyakarta dan Bali menghadapi persoalan yang oleh Nilsson (2020) dirumuskan sebagai ketidakseimbangan antara kecepatan pertumbuhan dan kemampuan warga menyerap perubahan. Dalam kerangka aditif, jawabannya

cenderung berupa penambahan kapasitas, misalnya pelebaran jalan, penambahan lahan parkir, dan penambahan fasilitas. Dalam model konsentris, jawabannya berbeda, karena persoalannya bukan pada kurangnya lapisan operasional, melainkan pada tergerusnya inti. Penambahan kapasitas tanpa pemulihan kendali warga hanya akan mempercepat penggerusan itu.

Kasus Yogyakarta memberi catatan tambahan yang menarik. Widayati dkk. (2020) menunjukkan bahwa citra destinasi memengaruhi keputusan berkunjung pada pariwisata perkotaan Yogyakarta melalui jalur komunikasi dari mulut ke mulut. Temuan itu sering dibaca sebagai pesan tentang pentingnya pemasaran. Model konsentris mengajukan pembacaan yang berbeda. Komunikasi dari mulut ke mulut menyampaikan pengalaman, dan pengalaman itu sebagian besar diproduksi melalui pertemuan dengan warga. Dengan demikian, citra destinasi perkotaan pada akhirnya merupakan cerminan dari keadaan intinya, bukan hasil dari kegiatan promosi semata.

4.5 Operasionalisasi, Dari Model Menuju Indikator

Kritik yang wajar terhadap usulan konseptual semacam ini adalah bahwa ia sulit dioperasikan. Untuk menjawabnya, artikel ini menurunkan empat mekanisme di atas menjadi indikator yang dapat dipakai dalam penilaian kesiapan destinasi.

Untuk mekanisme kepemilikan makna, indikator yang diusulkan meliputi keberadaan narasi tempat yang disusun oleh warga sendiri, keterlibatan warga sebagai pemandu atau penutur cerita, serta ada tidaknya kewenangan warga dalam menyetujui perubahan tampilan kawasan. Indikator ini mengukur kuasa atas makna, bukan jumlah kegiatan.

Untuk mekanisme kapasitas pemeliharaan, indikator yang diusulkan meliputi keberadaan aturan pemeliharaan yang disepakati warga, keberadaan sumber pembiayaan pemeliharaan yang berasal dari kegiatan wisata itu sendiri, keteraturan pelaksanaan pemeliharaan tanpa kehadiran program pemerintah, serta bekerjanya mekanisme teguran antarwarga. Rumusan indikator ini mengikuti prinsip kelembagaan Ostrom (1990).

Untuk mekanisme legitimasi sosial, indikator yang diusulkan meliputi tingkat dukungan warga yang diukur secara berkala, keberadaan saluran keberatan yang berfungsi, waktu tanggap terhadap keluhan warga, serta gejala penarikan diri warga dari kegiatan bersama. Indikator terakhir ini penting karena penolakan di kawasan permukiman Indonesia lebih sering berbentuk kepasifan daripada perlawanan terbuka.

Untuk mekanisme distribusi manfaat, indikator yang diusulkan meliputi sebaran penerima manfaat di dalam kawasan, proporsi belanja wisatawan yang tertahan di dalam kawasan, keterlibatan usaha milik warga dalam rantai pasok kawasan, serta ada tidaknya mekanisme berbagi manfaat bagi warga yang menanggung gangguan namun tidak memperoleh pendapatan langsung.

Perbedaan mendasar antara indikator yang diusulkan dan indikator yang lazim dipakai terletak pada tiga hal. Indikator yang diusulkan mengukur kuasa dan bukan kegiatan, mengukur ketahanan tanpa program dan bukan keberadaan program, serta mengukur sebaran manfaat dan bukan jumlah manfaat. Ketiganya dapat dikumpulkan melalui survei warga, telaah dokumen kesepakatan, dan pengamatan lapangan berkala tanpa memerlukan instrumen yang mahal.

Dalam penerapannya, artikel ini mengusulkan agar hasil penilaian inti tidak dijumlahkan dengan hasil penilaian lapisan operasional, melainkan diperlakukan sebagai pengali. Dengan cara ini, destinasi dengan lapisan operasional yang sangat baik namun inti yang sangat lemah tidak akan tampil sebagai destinasi bermutu tinggi dalam laporan penilaian. Justru kemampuan menandai keadaan semacam inilah yang menjadi nilai tambah utama dari model yang diusulkan.

4.6 Implikasi bagi Kebijakan dan Pengelolaan Destinasi

Rekonstruksi ini membawa sejumlah implikasi praktis yang perlu dinyatakan secara terbuka.

Implikasi pertama menyangkut urutan pekerjaan dalam pengembangan kawasan wisata perkotaan. Dalam kerangka aditif, pembangunan fisik dapat dimulai lebih dahulu sambil menunggu penyiapan masyarakat berjalan. Dalam model konsentris, urutan seperti itu berisiko tinggi, karena pembangunan fisik yang mendahului kesepakatan warga justru dapat merusak inti yang hendak dibangun. Kesepakatan tentang siapa memutuskan apa dan siapa memperoleh apa seharusnya mendahului, bukan menyusul.

Implikasi kedua menyangkut penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Selama ini bab tentang masyarakat umumnya berisi rencana pelatihan dan penyuluhan. Dengan model ini, bab tersebut seharusnya berisi rancangan kelembagaan, meliputi bentuk kesepakatan pemeliharaan, mekanisme berbagi manfaat, dan saluran penyelesaian keberatan. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat sesungguhnya lebih dekat pada rancangan kelembagaan semacam itu daripada pada rangkaian pelatihan.

Implikasi ketiga menyangkut pengelola destinasi. Organisasi pengelola destinasi perkotaan selama ini banyak mencurahkan sumber daya pada pemasaran dan penataan fisik. Model ini menyarankan pengalihan sebagian sumber daya menuju pekerjaan yang kurang terlihat namun menentukan, yaitu memelihara kesepakatan, menjaga saluran keberatan tetap hidup, dan memantau sebaran manfaat. Morrison dan Coca-Stefaniak (2020) menempatkan pengelolaan destinasi perkotaan sebagai pekerjaan tata kelola, bukan semata pekerjaan pemasaran, dan model ini memperkuat penempatan tersebut.

Implikasi keempat menyangkut pemanfaatan teknologi. Vardopoulos dkk. (2023) menunjukkan bahwa gagasan kota wisata cerdas perlu dibaca ulang secara kritis, karena teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan keberlanjutan. Dalam model konsentris, teknologi berada pada lapisan operasional. Ia dapat memperkuat inti apabila dipakai untuk memperluas saluran suara warga dan memantau sebaran manfaat. Ia justru dapat melemahkan inti apabila dipakai semata untuk memperbesar arus kunjungan pada kawasan yang dukungan warganya sudah menipis.

4.7 Batas Keberlakuan Model

Kejujuran akademis menuntut model ini dinyatakan batasnya, karena tidak semua destinasi perkotaan berperilaku seperti kampung wisata.

Batas pertama menyangkut tipe destinasi. Model konsentris paling kuat daya jelasnya pada destinasi yang menyatu dengan ruang hidup warga, seperti kampung wisata, kawasan pusaka yang masih dihuni, pasar tradisional, dan kawasan kuliner berbasis warga. Daya jelasnya melemah pada destinasi berbasis fasilitas tertutup, seperti taman hiburan berskala besar, pusat pertemuan dan pameran, museum berskala nasional, serta kawasan terpadu yang dikelola satu badan usaha. Pada tipe kedua, komunitas penyangga memang ada, tetapi hubungannya dengan mutu pengalaman wisata bersifat tidak langsung, sehingga pembacaan aditif tetap memadai.

Batas kedua menyangkut skala. Pada skala kawasan, komunitas dapat diidentifikasi dengan jelas dan mekanisme yang diuraikan bekerja secara nyata. Pada skala kota secara keseluruhan, istilah komunitas menjadi kabur karena warga kota tidak merupakan satu kesatuan kepentingan. Penerapan model pada skala kota memerlukan pemilahan lebih dahulu, yaitu komunitas kawasan mana yang dimaksud.

Batas ketiga menyangkut sifat model itu sendiri. Rumusan pengali yang diusulkan bersifat analitis, bukan matematis dalam arti sempit. Ia dipakai untuk menegaskan bahwa inti tidak dapat digantikan, bukan untuk menghasilkan angka yang presisi. Penerapannya dalam instrumen penilaian tetap memerlukan penetapan ambang batas dan pengujian empiris yang belum dilakukan dalam artikel ini.

Batas keempat menyangkut kemungkinan penyalahgunaan gagasan. Penempatan komunitas sebagai inti dapat disalahartikan sebagai pengalihan seluruh beban pemeliharaan kepada warga, sehingga pemerintah dan pelaku usaha merasa terbebas dari kewajiban. Penafsiran semacam itu bertentangan dengan maksud model. Kendali warga hanya bermakna apabila disertai sumber daya dan kewenangan yang memadai. Tanpa keduanya, yang terjadi bukan pemberdayaan, melainkan pemindahan beban.

5. KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari satu keganjilan yang sering luput diperhatikan. Kerangka 5A memasukkan keterlibatan komunitas sebagai komponen inti pariwisata perkotaan, tetapi cara kerangka itu dibaca dan dipakai justru memperlakukan komunitas sebagai pelengkap. Kesenjangan antara pengakuan dan perlakuan inilah yang menjadi pokok bahasan.

Melalui telaah pustaka integratif dan pembacaan ulang atas sejumlah kasus destinasi perkotaan Indonesia, artikel ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, pembacaan aditif terhadap kerangka 5A mengandung tiga kelemahan mendasar, yaitu kekeliruan tingkatan analisis, asumsi kemampuan saling menggantikan yang tidak berlaku untuk komponen komunitas, dan kelemahan indikator yang mengukur kegiatan alih-alih kuasa. Kedua, posisi yang lebih tepat bagi keterlibatan komunitas adalah sebagai komponen konstitutif yang menentukan keberfungsian empat komponen lainnya, sebagaimana dirumuskan dalam Model 5A Konsentris. Ketiga, hubungan konstitutif tersebut bekerja melalui empat mekanisme yang saling terkait, yaitu kepemilikan makna, kapasitas pemeliharaan, legitimasi sosial, dan distribusi manfaat.

Kontribusi artikel ini bersifat ganda. Pada tataran konseptual, artikel menawarkan penataan ulang terhadap kerangka yang selama ini diterima tanpa banyak diuji dalam kajian pariwisata Indonesia. Pada tataran praktis, artikel menurunkan penataan ulang itu menjadi indikator yang

mengukur kuasa, ketahanan tanpa program, dan sebaran manfaat, sehingga komponen komunitas dapat dinilai dengan ketegasan yang setara dengan komponen fisik.

Artikel ini memiliki keterbatasan yang jelas. Sebagai artikel konseptual, model yang diusulkan belum diuji secara empiris, dan kasus yang dipakai berfungsi sebagai ilustrasi analitis, bukan sebagai bukti. Ambang batas dan pembobotan dalam usulan indikator juga masih memerlukan penetapan melalui penelitian lanjutan.

Dari keterbatasan itu lahir agenda riset yang cukup jelas. Agenda pertama adalah pengujian model melalui penelitian lapangan pada beberapa kawasan wisata perkotaan dengan tingkat keterlibatan komunitas yang berbeda, untuk menguji apakah hubungan pengali benar-benar terlihat dalam data. Agenda kedua adalah penyusunan dan pengujian instrumen pengukuran keempat mekanisme, termasuk pengujian keandalan dan kesahihannya. Agenda ketiga adalah penelitian jangka panjang pada kampung wisata yang sudah berjalan lebih dari lima tahun, untuk menelusuri pada titik mana rantai keempat mekanisme itu putus. Agenda keempat adalah perbandingan lintas kota di kawasan Asia Tenggara, mengingat kota-kota di kawasan ini memiliki kemiripan dalam hal kepadatan permukiman dan kedekatan ruang wisata dengan ruang hidup warga.

Apabila agenda tersebut dijalankan, kerangka 5A tidak perlu ditinggalkan. Yang diperlukan adalah membaca ulang kerangka itu dengan lebih setia pada kenyataan kota-kota Indonesia, yaitu kenyataan bahwa daya tarik utama kota kita sebagian besar tumbuh dari kehidupan warganya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2023). Regenerative tourism: A conceptual framework leveraging theory and practice. *Tourism Geographies*, 25(4), 1026–1046.
- Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97–116.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice* (4th ed.). Pearson Education.
- Dickman, S. (1996). *Tourism: An introductory text* (2nd ed.). Hodder Education.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1), 18–26.
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204.

Kurniati, R., Kurniawati, W., Ristianti, N. S., & Syahri, E. K. (2023). Strategies for sustainable urban tourism in Kampoeng Batik, Semarang, Indonesia. [Lengkapi nama terbitan, volume, dan halaman sesuai versi terbit.]

Leiper, N. (1979). The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 390–407.

López-Gay, A., Cocola-Gant, A., & Russo, A. P. (2021). Urban tourism and population change: Gentrification in the age of mobilities. *Population, Space and Place*, 27(1), e2380.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.

Morrison, A. M., & Coca-Stefaniak, J. A. (Eds.). (2020). *Routledge handbook of tourism cities*. Routledge.

Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Methuen.

Nilsson, J. H. (2020). Conceptualizing and contextualizing overtourism: The dynamics of accelerating urban tourism. *International Journal of Tourism Cities*, 6(4), 657–671.

Novy, J., & Colomb, C. (2021). Urban tourism as a source of contention and social mobilisations: A critical review. In C. Milano, J. M. Cheer, & M. Novelli (Eds.), *Travel and tourism in the age of overtourism* (pp. 6–23). Routledge.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Page, S. J., & Duignan, M. (2023). Progress in tourism management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. *Tourism Management*, 98, 104737.

Phuc, H. N., & Nguyen, H. M. (2023). The importance of collaboration and emotional solidarity in residents' support for sustainable urban tourism: Case study Ho Chi Minh City. In *Theoretical advancement in social impacts assessment of tourism research* (pp. 56–75). Routledge.

Rahmad, M., Riyadi, A., Rachman, A. F., Muhandiansyah, D., Hastriana, E., Asmaniaty, F., Oktadiana, H., Hutagalung, M. H., Rahmanita, M., Widyastuti, N., Nurbaeti, Oktovianus, Inkadijaya, R., & Rianto. (2025). *Pariwisata perkotaan: Teori, perencanaan, dan implementasi*. Rama Asia Wisata.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.

Speake, J., & Kennedy, V. (2022). Changing aesthetics and the affluent elite in urban tourism place making. *Tourism Geographies*, 24(6–7), 1197–1218.

Sulistyaningsih, T., Jainuri, J., Salahudin, S., Jovita, H. D., & Nurmandi, A. (2022). Can combined marketing and planning-oriented of community-based social marketing (CBSM) project successfully transform the slum area to tourism village? A case study of the Jodipan colorful urban village, Malang, Indonesia. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 34(4), 421–450.

Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Vardopoulos, I., Papoui-Evangelou, M., Nosova, B., & Salvati, L. (2023). Smart "tourist cities" revisited: Culture-led urban sustainability and the global real estate market. *Sustainability*, 15(5), 4313.

Widayati, C. C., Ali, H., Permana, D., & Nugroho, A. (2020). The role of destination image on visiting decisions through word of mouth in urban tourism in Yogyakarta. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 177–196.

Zhang, J. (2023). The nonlinear effects of tourism on rural income inequality and urban–rural income inequality: Evidence from China. *Tourism Economics*, 29(1), 172–193.